

JAMAAH TABLIGH DAN PERGESERAN IDENTITAS POLITIK KEAGAMAAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

TABLIGH JIMMERS AND RELIGIOUS POLITICAL IDENTITY SHIFTS IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA

Saipul Hamdi

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
shamdi@unram.ac.id

Ihfan Rahmawadi

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
ihfanr@gmail.com

Arif Nasrullah

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
arif.nasrullah@unram.ac.id

Imam Malik Riduan

School of Social Sciences, Western Sydney University, Australia
malik.riduan@westernsydney.edu.au

Zaenuddin Hudi Prasojo

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
zaestain@yahoo.com



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Abstract

Tablighi Jamaat engages in proselytizing by spreading pure religious and spiritual principles without even mentioning politics. However, a number of Tablighi Jamaat leaders have recently started to actively participate in real politics, particularly in the 2019 presidential Election. The researchers looked at Tablighi Jamaat's involvement in the 2019 presidential election and their effects on shifting religious political identities as a result of their participation in or even campaigning for one of the presidential candidates' spouses. This study also aims to explore their views on the concept of democracy, Pancasila, and the discourse on the formation of the Islamic caliphate that has developed rapidly in Indonesia in recent years. This research was conducted in Lombok. It employed a qualitative method and technic of observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. The data found in this study were then analyzed using power theory and identity theory. The results of this study show that Tablighi Jamaat tends to be pragmatic in responding to various systems implemented by each country, including the democratic system and Pancasila. Additionally, they believe that rather than creating an Islamic state through violent actions, the Islamic caliphate is a state in which each individual has internalized Islamic beliefs. Some Tablighi Jamaat members participated in practical politics during the 2019 presidential election, however, this can be viewed from two angles: either as a justifiable activity because it was done outside of the Tablighi Jamaat forum, or as a deviation because it went against their proselytizing agenda.

Keywords: Political Identity, Tablighi Jamaat, 2019 Presidential Election, Islamic Caliphate, Democracy

Abstrak

Jamaah Tabligh merupakan kelompok Islam transnasional yang bergerak dalam bidang dakwah dengan menyampaikan ajaran yang murni tentang agama dan keimanan, tanpa sedikitpun membahas isu politik. Namun, beberapa tahun belakangan ini, beberapa tokoh Jamaah Tabligh di Indonesia mulai aktif terlibat dalam politik praktis, khususnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Adanya tokoh Jamaah Tabligh yang ikut berpartisipasi atau bahkan menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden mendorong peneliti untuk mengkaji keterlibatan mereka pada Pilpres 2019, serta dampaknya terhadap pergeseran identitas politik keagamaan mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami pandangan mereka tentang konsep demokrasi, Pancasila dan wacana pembentukan khilafah Islamiyah yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan di Lombok yang terpusat di beberapa masjid yang menjadi markas Jamaah Tabligh. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teori Kekuasaan dan Teori Identitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh cenderung pragmatis dalam menyikapi berbagai sistem yang diterapkan oleh setiap negara, termasuk sistem demokrasi dan Pancasila. Kelompok ini juga beranggapan bahwa khilafah Islamiyah merupakan kondisi di mana nilai-nilai Islam sudah terinternalisasi oleh setiap individu, bukan dengan mendirikan negara Islam melalui gerakan radikal. Pada Pilpres 2019, beberapa anggota Jamaah Tabligh terlibat dalam politik praktis dan hal tersebut dapat dilihat dalam dua perspektif yang saling berlawanan, yakni sebagai sebuah tindakan yang wajar karena dilakukan di luar forum Jamaah Tabligh, tetapi juga dinilai sebagai sebuah penyimpangan karena tindakan tersebut bertentangan dengan usul dakwah mereka.

Kata Kunci: Identitas Politik, Jamaah Tabligh, Pemilihan Presiden 2019, Khilafah Islamiyah, Demokrasi

PENDAHULUAN

Jamaah Tabligh merupakan salah satu kelompok Islam terbesar yang saat ini sudah tersebar di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia (Candra dkk., 2019; Mubarak dan Razak, 2015; Putra dkk., 2020). Sebagai kelompok Islam transnasional, Jamaah Tabligh berfokus pada gerakan dakwah keliling yang berupaya untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman, penguatan keimanan dan pentingnya aktivitas dakwah sebagai salah satu warisan Nabi Muhammad (Hamdi, dkk., 2022). Dalam kultur keagamaan Jamaah Tabligh, beberapa hal yang dianggap “tabu” selama *khuruj* adalah pembicaraan tentang isu politik dan masalah *khilafiyah* dalam agama (Hasanah, 2017; Hidayat dkk., 2018). Oleh karena prinsip dan sikap Jamaah Tabligh yang menafikan dan menjauhkan diri dari pembicaraan tentang isu politik ini yang kemudian menyebabkan keberadaan mereka dapat diterima dengan baik dan diberikan ruang untuk berkembang di setiap negara (Hamdi, 2022).

Sikap Jamaah Tabligh yang secara historis konsisten menjauhkan diri dari berbagai persoalan yang dapat menimbulkan perpecahan termasuk membicarakan masalah politik dan isu-isu *khilafiyah* tampaknya sudah mulai mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya di Indonesia. Beberapa di antara tokoh Jamaah Tabligh sudah mulai ikut terlibat dalam pembicaraan dan diskusi politik, bahkan mereka juga ikut berpartisipasi di dalam politik

praktis. Dalam skala nasional, keterlibatan Jamaah Tabligh dalam politik praktis mulai dapat dilihat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Bentuk keterlibatan mereka tidak hanya dalam bentuk peran mereka sebagai pemilih (*voter*), bahkan beberapa di antara tokoh mereka aktif menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden yang mereka dukung (Hamdi, 2020). Dalam konteks ini, dukungan yang mereka berikan dilakukan melalui berbagai media dan di dalam lingkungan komunitas mereka.

Artikel ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji keterlibatan anggota dan tokoh Jamaah Tabligh, dan dampaknya terhadap eksistensi Jamaah Tabligh dalam kontestasi Pilpres 2019 sebagai bentuk pergeseran identitas politik keagamaan mereka, mengingat sejak awal mula perkembangannya sampai beberapa tahun belakangan ini, mereka secara konsisten untuk menolak membahas isu politik. Keterlibatan para anggota Jamaah Tabligh dalam Pilpres 2019 tentunya akan berimbas pada pergeseran identitas politik keagamaan mereka. Dengan demikian, kajian tentang pergeseran identitas politik keagamaan ini sangat urgen untuk diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi pandangan Jamaah Tabligh tentang konsep dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, serta *khilafah Islamiyah* sebagai janji Allah yang dinilai sebagai konsep pemerintahan alternatif dan yang paling ideal di dalam ajaran Islam. Sebab sejauh ini, dalam menyikapi sistem demokrasi dan monarki, Jamaah Tabligh cenderung bersikap pragmatis dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk sistem pemerintahan negara tempat mereka berada (Mubarak dan Razak, 2015). Di samping itu, proyeksi keterlibatan Jamaah Tabligh pada kontestasi politik khususnya pada agenda-agenda Pilpres selanjutnya termasuk Pilpres 2024 juga menjadi aspek penting yang akan dikaji sebagai tujuan dalam penelitian ini.

Pada saat yang bersamaan, fenomena tentang keterlibatan Jamaah Tabligh dalam politik praktis dan bergesernya identitas politik keagamaan mereka masih belum banyak dikaji oleh akademisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2017), dan Sarwan dkk (2021) menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh saat ini telah mampu menjelma menjadi salah satu gerakan non-politik terbesar di dunia. Para anggota Jamaah Tabligh dilarang keras untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik, apalagi sampai ikut berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, anggota yang ikut terjun dan berpartisipasi di dalam politik akan mereka kecam. Di sisi lain, Jamaah Tabligh juga memiliki agenda untuk melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat, namun tidak memiliki agenda politik praktis tertentu yang hendak diwujudkan.

Bahkan, dalam situasi politik sesulit apapun, mereka sama sekali tidak pernah menyampaikan atau membicarakan tentang politik di dalam pengajian yang mereka laksanakan. Begitu juga ketika terdapat kebijakan pemerintah yang

bertentangan dengan ajaran atau apa yang mereka yakini, mereka cenderung hanya melakukan resistensi, alih-alih melakukan perlawanan atau propaganda terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang masalah ini menjadi penting, mengingat perkembangan Jamaah Tabligh yang semakin pesat di tengah gejolak politik nasional yang telah melibatkan berbagai elemen bangsa, termasuk dari kalangan kelompok beragama. Di sisi lain, permasalahan tersebut juga dibarengi dengan mulai munculnya wacana pendirian *khilafah Islamiyah* serta pertentangannya dengan sistem demokrasi dan Pancasila yang semakin menjadi perdebatan serius di kalangan para politisi, bahkan antar kelompok Islam itu sendiri.

Melihat kompleksitas persoalan terkait dengan perubahan politik sosial keagamaan khususnya di kalangan Jamaah Tabligh, maka penelitian ini menggunakan teori kekuasaan dan wacana Michel Foucault (1972), dan teori identitas Richard Jenkins (2008). Menurut Foucault, kekuasaan bukan merupakan suatu otoritas yang dimiliki atau berpusat pada subjek tertentu, melainkan sesuatu yang tersebar dan berada pada relasi-relasi sosial. Kekuasaan tidak berhenti pada suatu pencapaian, akan tetapi terus mengalami pergerakan dan perubahan secara dinamis (Foucault, 1972).

Foucault memandang bahwa terdapat wacana yang dapat menjelma sebagai himpunan wacana yang mampu membentuk dan melestarikan relasi kuasa itu sendiri di tengah masyarakat. Secara bahasa, wacana merupakan sebuah percakapan, ekspresi formal, maupun tulisan yang membahas tentang suatu topik tertentu (Foucault, 1972). Wacana dapat dimaknai dalam tiga perspektif, yaitu sebagai semua ungkapan umum, sebagai ungkapan kelompok, dan sebagai praktik yang teratur yang termasuk sejumlah ungkapan. Selain itu, wacana juga dapat melahirkan berbagai praktik sosial yang terus dilakukan, diulangi, dan diperbaharui (Foucault, 1972; Hamdi, 2011; Hidayat, 2019; Pitsoe & Leseka, 2012).

Dalam kaitannya dengan kekuasaan, sejatinya keberadaan wacana tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan yang ada dalam setiap relasi sosial. Alasan mengapa wacana dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan ialah karena kekuasaan merupakan elemen kunci dalam pembahasan tentang wacana, sebab wacana dilegitimasi oleh kekuasaan dan otoritas. Di sisi lain, wacana tidak lahir di dalam ruang hampa, melainkan dalam konstansi konflik dengan wacana lain atau dengan praktik sosial lain yang menginformasikan mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya, di mana wacana yang dominan akan diterima sebagai suatu kebenaran yang tidak boleh disentuh, dipertanyakan dan dikritisi lagi karena kuatnya rezim kebenaran di dalamnya (Mills, 1997; Bourdieu, 1977; Hamdi, 2011).

Di sisi lain, identitas merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok yang membuatnya menjadi khas dan berbeda dengan yang lain. Menurut Richard Jenkins (2008), identitas adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui siapa dirinya, siapa orang lain, bagaimana

orang lain mengetahui tentang dirinya, dan seterusnya. Pada dasarnya, identitas bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan akan terus mengalami perubahan dan dapat dinegosiasikan. Perubahan atau pergeseran identitas dapat disebabkan karena proses interaksi dengan orang maupun kelompok lain. Perubahan identitas dapat terjadi karena di dalam proses interaksi terdapat aktor yang berusaha untuk membuat orang lain melihat diri mereka sesuai dengan yang diinginkan (Astuti, 2017).

Identitas mengacu pada struktur keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok, di mana identitas yang ditampilkannya mampu menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan bagian dari kelompok sosial tertentu. Orang yang mempunyai kesamaan identitas akan memiliki persamaan kebudayaan, organisasi politik dan sosial, serta institusi-institusi dasar seperti agama. Selain itu, identitas sosial yang dimiliki oleh kelompok tertentu juga pada akhirnya akan melahirkan sebuah perbandingan sosial. Perbandingan sosial menurut Tajfel dan Turner dibutuhkan oleh seseorang untuk membentuk suatu identitas sosial dengan menggunakan orang atau kelompok lain sebagai sumber perbandingan. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui hal-hal yang berbeda antara identitas yang dimiliki oleh kelompoknya sendiri dengan orang atau kelompok eksternalnya (Hogg & Abrams, 1990).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti hendak menggambarkan secara lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk keterlibatan Jamaah Tabligh dalam Pilpres 2019 khususnya yang ada di Lombok, siapa calon yang mereka dukung, bagaimana dampaknya terhadap pergeseran identitas politik keagamaan mereka, serta pandangan mereka tentang konsep sistem demokrasi, Pancasila, dan *khilafah Islamiyah*. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Juli-Desember 2022) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terpusat di beberapa masjid yang tersebar di beberapa kabupaten yang menjadi basis dari Jamaah Tabligh. Alasan pemilihan daerah ini selain perkembangan Jamaah Tabligh yang terus menguat, juga kecenderungan anggotanya terlibat dalam diskursus politik. Sebagian besar anggota Jamaah Tabligh di wilayah ini ikut dalam aksi 212 di Jakarta. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk ikut berdemo, dan sebagian juga memanfaatkan waktunya berdemo ketika sedang menjalani dakwah *khuruj* di markas mereka di Jakarta. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh yang ditentukan melalui teknik *snowball sampling*. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Eksistensi Jamaah Tabligh sebagai salah satu kelompok Islam transnasional secara kuantitas semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Hamdi, 2022). Persebaran anggota Jamaah Tabligh ini hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, termasuk juga di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan estimasi jamaah sekitar 100 ribu orang. Sebagai bagian yang terintegrasi sampai kepada kelompok yang berada di pusat, Jamaah Tabligh di Lombok tentu memiliki persamaan dengan dengan semua kelompok Jamaah Tabligh yang ada di setiap penjuru dunia. Persamaan tersebut meliputi ideologi, prinsip dakwah, cara kerja, amalan yang dianjurkan, dan berbagai hal lainnya (Hamdi, 2022).

Dari sekian banyak persamaan tersebut, salah satu yang paling mencolok dan menjadi identitas Jamaah Tabligh di mata publik ialah terkait dengan *usul dakwah* yang di dalamnya terdapat empat hal yang tidak boleh disentuh, dua diantaranya yakni masalah politik dan *khilafiyah* (perbedaan pandangan di dalam agama). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh anggota Jamaah Tabligh serta Imam Rawatib di Markas Provinsi Jamaah Tabligh:

“Terkait hal itu, dikenal istilahnya 20 usul dakwah, 4 yang dikurangi, 4 yang diperbanyak, apa lagi ya saya lupa, dan terakhir seperti yang anda bilang tadi itu 4 hal yang tidak boleh disentuh. Pertama, masalah politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Masalah politik tidak boleh disentuh apalagi ketika sedang keluar (khuruj). Di sini tidak ada bicara politik, bicara dunia juga tidak ada” (wawancara dengan HS tanggal 5 dan 10 Oktober 2022).

Konsistensi para anggota Jamaah Tabligh khususnya yang berada di Pulau Lombok untuk tidak berbicara dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan politik lambat laun menjadikan kelompok ini memiliki identitas sosial yang kuat yang cenderung berbeda dengan kelompok Islam lainnya. Berbagai istilah belakangan mulai disematkan pada Jamaah Tabligh oleh orang-orang yang berada di luar lingkaran kelompok mereka, mulai dari *jamaah kompor*, *da'i kompor*, *jamaah khuruj*, bahkan istilah Jamaah Tabligh sendiri pun merupakan nama atau istilah yang disematkan oleh orang-orang yang bukan merupakan anggota kelompok Jamaah Tabligh itu sendiri. Pemberian nama tersebut bertujuan untuk memudahkan kelompok eksternal mengenal atau menyebut kelompok mereka, termasuk juga untuk memudahkan dalam hal administrasi jika urusannya berkaitan dengan pemerintah. Hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan anggota Jamaah Tabligh memperkuat argumentasi penulis terkait dengan hal tersebut, yang menyatakan:

“Tabligh ini tidak ada namanya, sejak awal memang tidak punya nama. Justru yang memberikannya nama itu media massa karena teman-teman jamaah ini kan sering menyampaikan (tabligh), makanya disebut Jamaah Tabligh. Selain itu, oleh pemerintah untuk melegalkan cara kerja ini maka dinamakan Jamaah Tabligh dan

untuk memudahkan koordinasi (tanggal dan menit ke berapa)" (wawancara dengan S tanggal 10 Oktober 2022).

Di sisi lain, penyematan nama/label Jamaah Tabligh sebagai sebuah identitas memberikan konsekuensi terhadap tumbuhnya kolektivitas di antara mereka berupa munculnya perasaan "kekitaan." Selain itu, penyematan label sebagai identitas sosial yang dimiliki oleh Jamaah Tabligh di Lombok juga pada akhirnya akan melahirkan sebuah perbandingan sosial. Dalam praktiknya, untuk membedakan posisi mereka dengan kelompok Islam lain dalam memandang atau menyikapi sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, mereka menggunakan kelompok Islam lain sebagai pembanding yang semakin memperjelas posisi mereka sebagai kelompok yang memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok lain. Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Jamaah Tabligh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Bayan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) ketika dimintai pandangannya mengenai konsep *khilafah Islamiyah*:

"Mungkin di organisasi lain seperti HTI atau Salafi, mungkin mereka berbicara tentang khilafah islamiyah, tapi kalau di teman-teman jamaah itu tidak ada berbicara khilafah atau sistem negara. kalau kita bilang betul-betul memahami sistem demokrasi ya tidak, terlalu anuk dengan sistem demokrasi juga tidak, jalan tengah mereka itu, menolak tidak, menerima 100% juga tidak begitu" (wawancara dengan HZ tanggal 15 Oktober 2022).

Jika dikorelasikan antara konsep teori identitas dengan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menguatkan identitas mereka terkait dengan posisinya dalam menyikapi berbagai isu sensitif seperti politik, masalah *khilafiyah* dan *khilafah Islamiyah*, Jamaah Tabligh melakukan perbandingan dengan kelompok lain yang cenderung memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dengan prinsip yang mereka yakini. Dengan demikian, identitas mereka sebagai suatu kelompok akan eksis dan lebih mudah dikenal atau diidentifikasi oleh anggota mereka serta orang-orang yang berada di luar kelompok mereka.

Pandangan Terhadap Sistem Demokrasi dan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara yang telah disepakati bersama merupakan jalan tengah yang dianggap paling sesuai untuk merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia. Artinya, keberadaan Pancasila dinilai tidak hanya mewakili suatu golongan tertentu, baik itu mayoritas maupun minoritas, tetapi semua golongan merasa terwakili dengan adanya Pancasila. Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan konsekuensi terhadap munculnya keharusan bagi semua produk hukum yang diciptakan harus selaras dan mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Siswanto & Islamy, 2022). Demikian halnya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang keberadaannya pun telah diatur di dalam konstitusi. Bahkan, nilai demokrasi

secara tidak langsung telah tertuang di sila ke-4 Pancasila. Dengan dijalankannya sistem demokrasi di Indonesia, maka kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sebab, demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh atas negara kemudian dijalankan oleh pemerintah negara tersebut sebagai perwakilan dari suara/aspirasi.

Dijalankannya sistem demokrasi dan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia pada realitasnya tidak sepenuhnya diterima oleh setiap kalangan, salah satunya dari kalangan Islam. Meskipun organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) telah sepakat dengan sistem demokrasi dan Pancasila dan dianggap tidak bertentangan dengan nilai agama, namun tetap ada beberapa kelompok Islam lain yang masih menentang hal tersebut. Terlebih dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, wacana tentang pendirian negara Islam yang tentu saja dalam waktu yang bersamaan juga mempertentangkan keberadaan sistem demokrasi yang dianggap sebagai produk dari Barat yang tidak sejalan dengan nilai dan ajaran Islam. Diskursus ini telah berkembang dan menjadi perdebatan yang serius, terutama oleh berbagai kelompok dari kalangan Islam itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pandangan yang dikotomis yang menyebabkan terjadinya benturan, di mana beberapa kelompok menganggap bahwa hukum Islam (syariat) harus diletakkan sebagai landasan hukum Indonesia, sementara kelompok lainnya yang cenderung nasionalis menilai bahwa hukum Indonesia saat ini telah sesuai dengan tempatnya, sebab Indonesia bukanlah negara Islam.

Dalam konteks Jamaah Tabligh di Lombok, diskursus berbagai kelompok Islam mengenai sistem demokrasi dan Pancasila sejauh ini tidak mampu untuk menggerus Jamaah Tabligh untuk terlibat dalam diskursus yang serupa. Para anggota Jamaah Tabligh tetap bertahan dan memegang teguh *usul dakwah* yang mereka anut, di mana di dalamnya mereka dilarang untuk membicarakan politik, termasuk juga dengan sistem demokrasi ataupun Pancasila. Dalam posisi ini, mereka tidak menolak maupun menerima sistem apapun yang dijalankan oleh suatu negara, termasuk demokrasi. Dalam menyikapi sistem demokrasi, Jamaah Tabligh lebih cenderung untuk bersikap pragmatis dan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk sistem yang diterapkan oleh negara tempat mereka berada (Mubarak & Razak, 2015). Sebagaimana disampaikan oleh anggota Jamaah Tabligh di dalam salah satu kutipan wawancara yang mengatakan:

"Di Jamaah (Tabligh) sendiri tidak terlalu merespon tentang hal-hal seperti itu (sistem demokrasi). Apa yang berlaku di negara kita itulah yang kita terima. Seperti pemerintahan pak Suharto itu juga kita terima. Kita menganggap pemerintah itu ulil amri. Termasuk demokrasi juga kita terima, tidak ada permasalahan" (wawancara dengan HA tanggal 10 Oktober 2022).

Sikap Jamaah Tabligh yang cenderung apatis terhadap keberadaan sistem demokrasi dan Pancasila di tengah berkembang pesatnya diskursus mengenai pertentangan antara dua konsep tersebut dengan ajaran Islam dalam beberapa waktu belakangan ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, mereka begitu taat dan tunduk terhadap penguasa di tengah mereka, yaitu pihak pemegang otoritas (kekuasaan). Perlu diketahui bahwa kekuasaan tidak hanya melekat pada satu orang atau pihak tertentu, melainkan keberadaannya tersebar secara merata di dalam setiap relasi kuasa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada subjek tertentu, melainkan tersebar di dalam setiap relasi sosial (Hidayat, 2019). Dalam konteks ini, kekuasaan yang ada di Jamaah Tabligh bisa saja menjelma atau dimiliki oleh seorang *Amir*, Ustadz/Ulama, orang-orang yang dituakan, dan seterusnya, tergantung dari relasi sosial yang dibentuk. Hal inilah kemudian yang menjadikan Jamaah Tabligh tetap dalam pendiriannya, karena di dalam setiap relasi sosial di dalam kelompok mereka, setiap pihak yang berkuasa dalam relasi tersebut misalnya seperti *Amir* senantiasa mengarahkan untuk tidak ikut berbicara atau mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem negara seperti demokrasi dan Pancasila. Bahkan, para pemegang kuasa di antara mereka juga mengarahkan anggota Jamaah Tabligh untuk taat dan mengikuti setiap arahan pemerintah negara. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan salah satu anggota Jamaah Tabligh ketika dimintai pendapatnya: *"Kita diarahkan terus sama Maulana Saad untuk ikut kepada pemerintah, kan banyak juga anggota Jamaah Tabligh dari kalangan pemerintah"* (wawancara dengan T tanggal 6 Oktober 2022).

Kedua, kekuasaan yang ada di kalangan Jamaah Tabligh telah memilih wacana tertentu untuk didukung, sehingga wacana lain yang lebih luas menjadi termarginalkan. Wacana yang didukung yakni terkait dengan doktrin/ajaran untuk menjauhi diskursus tentang sistem demokrasi dan Pancasila, serta berbagai sistem lainnya. Menurut Foucault dalam Budiman dan Saifullah (2020), adanya wacana yang didukung oleh kekuasaan menyebabkan wacana tersebut menjadi dominan, sehingga pandangan subjek terhadap wacana lain yang terpinggirkan akan terhalang. Ajaran untuk menghindari pembicaraan tentang sistem negara seperti demokrasi dan Pancasila menjadi wacana dominan yang berkembang di tengah kelompok Jamaah Tabligh.

Akibatnya, wacana lain seperti penerimaan ataupun penolakan terhadap sistem demokrasi, bahkan wacana untuk melakukan diskusi terkait keberadaan sistem demokrasi pun menjadi tertutup, tidak ada ruang bagi siapapun untuk membicarakan hal tersebut ketika berada di dalam ruang lingkup dakwah Jamaah Tabligh. Beda halnya dengan beberapa kelompok Islam lain yang secara terang-terangan memiliki sikap untuk mendukung ataupun menolak sistem demokrasi, di mana di dalam kelompok-kelompok tersebut dihadirkan ruang untuk mengembangkan diskursus tersebut. Proses terpinggirkannya beragam wacana tentang sistem demokrasi dan Pancasila dalam internal Jamaah Tabligh pada akhirnya akan berimplikasi terhadap hilangnya kesempatan khalayak

(anggota Jamaah Tabligh) untuk mengakses berbagai informasi yang beragam mengenai wacana sistem demokrasi dan Pancasila. Namun, perlu ditegaskan bahwa bukan berarti wacana yang terpinggirkan itulah yang memiliki nilai kebenaran ataupun sebaliknya, melainkan dimensi peristiwa menjadi tidak lengkap karena terbatasnya perspektif yang ada (Budiman & Saifullah, 2019).

Ketiga, sejauh ini tidak ada proses normalisasi yang terjadi terhadap pembiasaan mengenai diskursus tentang sistem demokrasi dan Pancasila. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang logis, sebab kekuasaan yang ada di dalam internal Jamaah Tabligh tidak menghendaki hal tersebut. Normalisasi merupakan konsep pemikiran dari Foucault yang dipandang sebagai suatu proses untuk menginternalisasikan nilai dan norma di suatu lingkungan masyarakat. Artinya, kekuasaan melalui proses ini berupaya untuk menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya sebagai sesuatu yang normal, sehingga subjek tidak menyadari proses penundukan tersebut (Kamahi, 2017).

Dalam konteks Jamaah Tabligh di Lombok, berbagai proses normalisasi yang memungkinkan terjadinya proses pembiasaan mengenai hadirnya ruang diskursus tentang sistem demokrasi dan Pancasila sama sekali tidak ada. Proses normalisasi melalui kegiatan seperti *Bayan*, *Muzakarah*, *Jaulah*, dan berbagai istilah kegiatan lain yang menjadi media sosialisasi di kalangan Jamaah Tabligh tidak memberikan ruang bagi berbagai wacana tersebut untuk didiskusikan. Artinya, tidak ada ceramah yang membahas tentang sistem dan dasar negara, entah itu dari perspektif yang mendukung atau pun menolak sistem tersebut, sehingga tidak ada ruang bagi Jamaah Tabligh untuk membiasakan diri (menganggap normal) pembahasan tentang wacana sistem negara. Pada akhirnya, diskursus mengenai persoalan tersebut menjadi sesuatu yang tabu dan tidak memiliki eksistensi di kalangan Jamaah Tabligh.

Pandangan terhadap *Khilafah Islamiyah*

Pembentukan negara berdasarkan hukum/syariat Islam atau yang lebih dikenal dengan *khilafah Islamiyah* merupakan wacana yang sejalan dengan penolakan terhadap sistem negara yang didasarkan atas hukum yang tidak berlandaskan pada syariat Islam. Berbicara tentang *khilafah Islamiyah*, sejatinya konsep tersebut merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap umat Islam dari berbagai kelompok sebagai suatu konsep pemerintahan yang paling ideal yang dijanjikan oleh Allah akan terwujud suatu saat nanti. Namun, yang membedakan masing-masing kelompok tersebut adalah mengenai penafsiran tentang implementasi dari *khilafah Islamiyah* itu sendiri. Beberapa kelompok di antaranya meyakini bahwa *khilafah Islamiyah* harus ditegakkan melalui upaya-upaya konkret seperti merubah sistem negara saat ini menjadi sistem negara berdasarkan syariat Islam. Berbeda halnya dengan Jamaah Tabligh, di saat berbagai kelompok yang berstatus sebagai kelompok Islam transnasional secara gencar melakukan kampanye pembentukan *khilafah Islamiyah* dan berbagai agenda politik lainnya,

justru Jamaah Tabligh tetap bertahan untuk tetap menjalankan gerakan dakwah yang berbasis Islam kultural tradisional.

Konsistensi Jamaah Tabligh untuk tidak berupaya mendirikan negara Islam atau bahkan mengkampanyekannya pada dasarnya disebabkan karena penafsiran mereka terhadap *khilafah Islamiyah* cenderung berbeda dengan pandangan kelompok Islam transnasional lain yang dijelaskan sebelumnya. Dalam konsep Jamaah Tabligh, *khilafah Islamiyah* merupakan suasana tegaknya syariat Islam dalam berbagai ruang lingkup kehidupan yang dimulai dari ditegakkannya syariat oleh setiap individu. Mereka tidak mempersoalkan sistem yang diterapkan di suatu negara, bahkan mereka sama sekali tidak memiliki agenda untuk merubah sistem tersebut agar sesuai dengan syariat Islam. Berbagai upaya konkret untuk mendirikan negara Islam seperti dengan merubah sistem negara yang sudah ada misalnya melalui demonstrasi atau gerakan *people power* sangat dihindari oleh Jamaah Tabligh. Menurut pandangan mereka, untuk membangun sistem *khilafah* bukan dilakukan dengan membangun gerakan-gerakan secara radikal yang masif, melainkan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk menerapkan nilai-nilai yang dikehendaki dalam sistem *khilafah Islamiyah* itu sendiri (Mubarak & Razak, 2015). Hal tersebut dilakukan dengan cara membangun kesadaran beragama pada setiap individu yang dimulai dari diri sendiri melalui gerakan dakwah. Sebab, yang menjadi kewajiban setiap muslim adalah untuk berdakwah, bukan untuk mendirikan negara Islam. Menurut keyakinan mereka, jika setiap agama sudah mampu hidup di dalam setiap diri individu, maka *khilafah Islamiyah* itu akan berdiri sendiri nantinya. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai *khilafah Islamiyah* telah disampaikan oleh berbagai informan dalam wawancara, salah satunya mengungkapkan bahwa:

"Jamaah Tabligh tidak mau melakukan itu (mendirikan khilafah Islamiyah) karena nanti akan bentrok dengan pemerintah. Jamaah Tabligh itu mengikuti sistem yang ada, di manapun mereka berada, intinya yang dibangun itu manusianya, bukan sistem negaranya. Kalau nanti semua manusia sudah punya kesadaran beragama, dengan sendirinya sistem negara itu akan dibangun. Apalagi Jamaah Tabligh ini seragam semua programnya dan apa yang dibicarakan di seluruh dunia. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Jamaah Tabligh ini tidak mau merombak sistem, tapi lebih fokus kepada bagaimana agar individu ini mempunyai agama yang berkualitas" (wawancara dengan HA tanggal 10 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, selain cara pandang Jamaah Tabligh terhadap konsep *khilafah Islamiyah* yang berbeda dengan kelompok Islam transnasional lainnya, sikap untuk tidak melakukan upaya mendirikan negara Islam dengan merubah sistem negara yang sudah ada juga dilakukan agar tidak terjadi pertentangan dengan pemerintah negara yang sah. Cara ini dilakukan oleh Jamaah Tabligh sebagai bagian dari upaya untuk menormalisasikan ajaran yang mereka bawa, yakni dengan cara menyampaikan dakwah yang damai dan menghindari konfrontasi dengan pemerintah. Penulis memandang sikap

dan tindakan tersebut sebagai upaya normalisasi, sebab pada akhirnya semua kelompok Islam termasuk Jamaah Tabligh tidak menafikan bahwa berdirinya khilafah Islamiyah adalah sesuatu yang diinginkan. Namun, proses atau cara untuk mewujudkannya saja yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Jamaah Tabligh cenderung menghindari cara-cara yang represif, melainkan melalui proses normalisasi yang menanamkan nilai dan ajaran Islam. Sebagaimana yang mereka yakini, ketika ajaran Islam telah sempurna diamalkan oleh setiap individu, maka khilafah Islamiyah itu akan berdiri dengan sendirinya. Sebagaimana pemikiran Foucault dalam Kamahi (2017), bahwa proses penundukan itu dilakukan secara hegemonik, dan ketika proses penguasaan itu telah berlangsung tanpa disadari, maka upaya penundukan tersebut telah dinormalisasikan. Hal ini dikarenakan kekuasaan yang dikehendaki tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi.

Partisipasi Jamaah Tabligh Pada Pilpres 2019

Kontestasi politik merupakan salah satu ajang bagi setiap kandidat politik untuk berupaya meraih kekuasaan melalui prosedur yang sah, yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kontestasi politik, para calon kandidat tidak hanya mempertarungkan ide dan gagasan semata untuk mendapatkan atensi publik. Lebih dari itu, tidak jarang para calon kandidat menggunakan isu politik identitas sebagai senjata utama untuk meraih atau bahkan melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Lukmantoro (Nasrudin, 2018), politik identitas merupakan politik yang mengedepankan kepentingan anggota kelompok karena memiliki identitas yang sama yang didasarkan atas ras, gender, etnisitas, dan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, politik identitas mulai mengemuka kembali pasca-reformasi yang ditandai dengan mendominasinya wacana Islam di ruang publik melalui berbagai gerakan politik elektoral selama masa kampanye pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta dan terus berlanjut sampai Pilpres 2019. Dalam banyak kasus (termasuk pada Pilpres 2019), politik identitas ini muncul pada kondisi di mana suatu kelompok (yang pada akhirnya menggunakan politik identitas) mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan termarginalkan baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya (Rubaidi & Setianingsih, 2021).

Dalam kaitannya dengan politik identitas sebagaimana definisi di atas, agama menjadi salah satu entitas penting yang kerap kali dimaknai sebagai dasar persamaan identitas yang kemudian menggerakkan suatu kelompok untuk berjuang dalam ranah politik dengan mengatasnamakan identitas agama. Ada dua faktor yang menyebabkan agama seringkali dipakai dalam politik identitas dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik. *Pertama*, momentum agama menjadi faktor yang dipertaruhkan, di mana agama diposisikan untuk membela dan mempertahankan identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok. *Kedua*, proses politik berlangsung secara kompetitif yang berarti kelompok-kelompok yang terlibat di dalam politik identitas saling berhadapan dan tidak

ada yang lebih dominan, sehingga pemenang dalam kontestasi tersebut tidak bisa terlihat dengan jelas sejak jauh-jauh hari (Rubaidi & Setianingsih, 2021).

Pada Pilpres 2019, penggunaan politik identitas nyatanya tidak hanya digunakan oleh salah satu pasangan calon semata, kedua pasangan calon presiden menggunakan politik identitas. Namun demikian, penggunaan politik identitas antara kedua pasangan calon tersebut memiliki latar belakang yang berbeda (Ardipandanto, 2020). Tidak jarang, kelompok pendukung dari keduanya menggunakan latar belakang identitas untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Misalnya, pada waktu itu Jokowi dituduh sebagai sosok yang kurang religius, bahkan diisukan sebagai pemimpin yang tidak suka (mendiskriminasi) ulama. Untuk melakukan *counter* terhadap isu tersebut, maka Jokowi kemudian memilih Ma'ruf Amin yang merupakan ulama sekaligus pimpinan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi dalam Pilpres 2019. Di sisi lain, Prabowo yang menjadi lawan politiknya selain diisukan sebagai sosok yang otoriter karena memiliki hubungan dengan Soeharto di mana jika dia terpilih sebagai presiden maka Indonesia akan kembali seperti zaman Orde Baru, silsilah keluarganya yang berasal dari keluarga Nasrani juga dihembuskan ke permukaan (Kiftiyah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas atas nama agama pada Pilpres 2019 merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan digunakan oleh kelompok dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada waktu itu.

Penggunaan politik identitas pada Pilpres 2019 nyatanya tidak hanya berdampak secara langsung terhadap nama baik pasangan calon tertentu saja. Lebih jauh dari itu, kelompok-kelompok partisipan yang umumnya merupakan kelompok agama Islam juga mengalami perpecahan. Berbagai narasi dikotomis tentang klaim kebenaran satu sama lain misalnya seperti "Islam versus sekuler, Pancasila versus syariat Islam, Islamis versus nasionalis, ataupun partai Allah versus partai setan" (Rubaidi & Setianingsih, 2021) menjadi narasi yang selalu digaungkan selama kontestasi itu berlangsung. Polarisasi umat Islam dan rakyat secara umum pada waktu itu benar-benar terjadi memberikan dampak yang besar bagi dinamika politik negara dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari terjadinya fenomena politisasi ulama (dari berbagai kalangan kelompok Islam), di mana masing-masing kubu saling mengklaim dalam istilah ulama sebagai daya tarik untuk meyakinkan simpatisan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Huda & Dayat, 2019).

Di sisi lain, salah satu faktor utama penggunaan politik identitas bahkan oleh kelompok Islam "kalangan bawah" pada Pilpres 2019 sebagaimana dijelaskan sebelumnya ialah karena munculnya rasa ketidakadilan dan diskriminasi di antara mereka, entah itu menyangkut urusan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Terlebih, salah satu pasangan calon juga memainkan isu tersebut untuk semakin memperkuat asumsi kelompok tersebut, serta untuk mengambil simpati mereka.

Setyaningrum (2005) melihat bahwa politik identitas berbeda dengan identitas politik. Politik identitas mengacu pada cara atau mekanisme di dalam proses politik untuk mengorganisasikan identitas sebagai sumber daya dan sarana politik. Sedangkan identitas politik adalah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam suatu ikatan komunitas politik. Selain itu, identitas politik berkaitan dengan berbagai hal yang meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, di mana identitas politik berperan sebagai penentu posisi individu dalam komunitasnya melalui rasa kepemilikan (*sense of belonging*) sekaligus menandai posisi subjek yang lain dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*). Jika merujuk kepada definisi tersebut, maka identitas politik keagamaan Jamaah Tabligh dapat didefinisikan sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan Jamaah Tabligh di dalam konteks perpolitikan negara yang didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama yang mereka yakini dan amalkan.

Kontestasi Pilpres 2019 sebagai pertarungan politik identitas berbasis agama telah berhasil menyeret berbagai kelompok besar Islam ke dalam pusaran politik praktis. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan Pilpres 2019 di Lombok menjadi penting untuk disorot, mengingat situasi politik pada saat itu mampu melahirkan ketegangan di mana agama dijadikan sebagai senjata utama dalam meraih suara publik, terlebih Lombok dikenal dengan masyarakatnya yang religius yang dilegitimasi oleh julukannya sebagai Pulau Seribu Masjid. Di sisi lain, organisasi besar Islam yang ada di Lombok yaitu Nahdlatul Wathan (NW) secara terang-terangan mendukung pasangan Jokowi-Amin dalam Pilpres 2019. Kendati demikian, *power* yang dimiliki oleh para pemuka agama dari kalangan NW dalam relasi kuasanya dengan masyarakat Lombok nyatanya tidak mampu mengintervensi pilihan masyarakat secara signifikan, buktinya perolehan suara Prabowo-Sandi jauh mengungguli pasangan Jokowi-Amin. Hal ini dikarenakan para pemuka agama (Tuan Guru) sebagai unsur komunikator politik pada tingkat lokal dinilai komparatif dengan komunikasi politik media yang disebabkan perbedaan fungsi Tuan Guru dalam politik praktis, akibatnya ijtihad politik masyarakat Lombok tidak dapat dirubah secara persuasif (Rijal, 2019; Azmi, 2022).

Masifnya penggunaan politik identitas yang ikut serta membawa berbagai kelompok Islam di dalamnya seperti NW dalam konteks Pilpres 2019 di Lombok menyebabkan munculnya asumsi publik terhadap adanya kemungkinan kelompok-kelompok Islam lain juga ikut terlibat dalam politik praktis dalam kontestasi politik yang sama, termasuk juga kelompok Islam yang sejak dahulu konsisten tidak berbicara tentang politik seperti Jamaah Tabligh. Pada Pilpres 2019, di beberapa komunitas Jamaah Tabligh mulai muncul beberapa berita politik yang bersifat provokatif, tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok Islam lain yang anti pemerintah, bahkan beberapa tokohnya seperti Ustadz Derry Sulaiman juga berperan sebagai tim sukses Prabowo-Sandi (Hamdi, 2020).

Keadaan ini memunculkan satu pertanyaan besar, “Apakah Jamaah Tabligh sudah mengalami pergeseran identitas politik keagamaan?”

Dari hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan fakta bahwa pada dasarnya Jamaah Tabligh selalu ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kontestasi politik, termasuk juga pada Pilpres 2019. Peran mereka pun beragam, mulai dari berperan sebagai pemilih, bahkan sebagai anggota partai tertentu dan juru kampanye. Keadaan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang dianggap lumrah, sebab mereka memaknai larangan untuk ikut berpartisipasi dalam politik praktis hanya berlaku ketika mereka berada dalam ruang lingkup kegiatan Jamaah Tabligh, misalnya seperti *khuruj*, *bayan*, *jaulah*, dan sebagainya. Sehingga, ketika mereka telah keluar dari kegiatan tersebut dan kembali ke rumah masing-masing, maka mereka akan kembali seperti masyarakat pada umumnya, dan larangan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Para anggota Jamaah Tabligh akan kembali menjalankan peran keduniaannya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, termasuk juga anggota yang bekerja di sektor politik maka akan melanjutkan kembali perannya di sektor tersebut. Selain itu, keterlibatan mereka dalam politik praktis juga tidak dipermasalahkan selama mereka tidak membawa nama Jamaah Tabligh dan tidak memanfaatkan posisinya sebagai anggota Jamaah Tabligh untuk melanggengkan kepentingan politiknya. Hal ini disampaikan oleh berbagai informan, salah satu di antaranya dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Anda mau nyalon (ikut politik praktis) ya silahkan, tidak ada batasan karena itu termasuk profesi yang penting jangan dibicarakan di dalam forum Jamaah, jangan saling menjelek-jelekan, begitu saja sebenarnya. Seperti pak Husni Tamrin yang dari PPP, kita tidak pernah membicarakan tentang PPP atau apa ketika kita sama-sama keluar, dan beliau tidak pernah mempromosikan diri, tidak boleh juga dilakukan. Jadi kita hindari/hilangkan 5 perkara itu (suku, bangsa, bahasa, dan terakhir status sosial). Apapun profesinya tidak pernah ada yang membicarakan hal itu, walaupun tahu hanya sekedar tahu. Melebur semuanya menjadi satu” (wawancara dengan HA tanggal 10 Oktober 2022).

Keadaan semacam ini menimbulkan konsekuensi berupa ambiguitas. *Pertama*, kembalinya anggota Jamaah Tabligh ke dalam lingkungan masyarakatnya tentu tidak akan serta-merta melepas identitas keagamaannya sebagai anggota kelompok Jamaah Tabligh. Sebab jika kita merujuk kembali pada konsep identitas sosial yang merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional bagi dirinya dari keanggotaan tersebut. Sementara, jika anggota Jamaah Tabligh menanggalkan salah satu identitas kelompok mereka yang paling menonjol yakni tidak membicarakan atau terlibat politik praktis dengan ikut berpartisipasi dalam politik praktis ketika telah kembali dari *khuruj* akan menyebabkan munculnya ambiguitas

terutama dari orang-orang yang bukan merupakan anggota Jamaah Tabligh. Hal ini disebabkan karena identitas tidak hanya mengacu pada bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, melainkan juga bagaimana orang/kelompok lain mengenal diri kita (Jenkins, 2008).

Kedua, tidak ada konsistensi dan batasan antara mana identitas Jamaah Tabligh yang harus dilepas dan dipertahankan ketika telah kembali dari kegiatan Jamaah Tabligh itu sendiri. Keterlibatan Jamaah Tabligh dalam Pilpres 2019 di Lombok sebagai pendukung atau juru kampanye paslon tertentu kalau merujuk pada *usul dakwah* tentu merupakan sesuatu yang bertentangan. Namun di sisi lain, mereka berargumentasi bahwa hal tersebut dikembalikan ke diri masing-masing anggota Jamaah Tabligh, dalam arti tidak ada anjuran ataupun larangan, dengan kata lain dibebaskan ketika sudah berada di luar forum Jamaah Tabligh. Akan tetapi, yang menjadi perbandingan pentingnya adalah *usul dakwah* yang lain sebisa mungkin harus tetap dijalankan meskipun para anggota Jamaah Tabligh sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Artinya, tidak ada alasan yang konsisten dan batasan yang jelas antara mana identitas Jamaah Tabligh yang dilepas dan mana yang dipertahankan ketika mereka telah kembali ke lingkungan sosialnya masing-masing.

Terlepas dari ambiguitas yang terjadi, perspektif lain memandang bahwa segala bentuk keterlibatan Jamaah Tabligh dalam politik praktis termasuk Pilpres 2019 merupakan bentuk penyimpangan atau sebagai wujud pergeseran identitas politik keagamaan mereka. Hal ini dikarenakan secara praktik, argumentasi terkait pemisahan antara ruang dakwah dengan ruang dunia (termasuk urusan politik) yang dilakukan tidak dapat benar-benar terpisah secara penuh dan berada pada dua domain yang berbeda. Sebab, sebagai anggota Jamaah Tabligh yang ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2019, tentu akan ada irisan antara dua domain tersebut (domain dakwah dan domain politik) meskipun tidak secara langsung. Artinya, *image* sosial yang terbangun selama ini terhadap anggota Jamaah Tabligh tentu tidak akan terlepas begitu saja meskipun mereka telah kembali dari forum dakwahnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika pilihan atau sikap politik anggota Jamaah Tabligh dianggap sebagai bagian dari pengaruh ajaran dakwah.

Pergeseran identitas politik keagamaan Jamaah Tabligh di Lombok dalam Pilpres 2019 secara kolektif mungkin tidak dapat terlihat secara kasat mata. Namun, keterlibatan beberapa anggota dan tokohnya dalam politik praktis ini tidak dapat dinafikan sebagai suatu fakta yang memang terjadi di lapangan. Bahkan, beberapa pihak di antara kalangan Jamaah Tabligh di Lombok mengamini hal tersebut dan menganggap bahwa orang-orang yang sudah melakukan politik praktis tersebut sebagai orang yang sudah keluar dari jalur dakwah. Dalam salah satu wawancara ketika diminta pendapatnya mengenai anggota Jamaah Tabligh yang ikut berpolitik, secara tegas anggota Jamaah Tabligh menyampaikan:

“Nah itu, jangan sampai doa Maulana Ilyas itu nanti kena imbasnya, “kalau ada unsur keuntungan pribadi segala macam, hancurkan Ya Allah.” Ada tiga doanya Maulana Ilyas, itu tadi ada partai, bisnis segala macam. Ya jelas dalam usul dakwah itu tidak boleh berpolitik” (wawancara dengan T tanggal 6 Oktober 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa politik praktis itu sangat dihindari oleh Jamaah Tabligh, meskipun dilakukan di luar forum kelompok mereka, sebab identitas yang melekat dalam diri anggota tersebut sebagai individu, tidak terlepas dari identitasnya sebagai bagian dari Jamaah Tabligh. Dengan mulai bergesernya identitas politik keagamaan beberapa anggota Jamaah Tabligh menunjukkan bahwa wacana dominan yang berkembang dan diproduksi oleh kekuasaan di dalam lingkungan Jamaah Tabligh tidak mampu sepenuhnya menutup pandangan subjek terhadap wacana lain yang cenderung termarginalkan. Artinya, beberapa anggota Jamaah Tabligh yang terlibat dalam politik praktis mampu menggunakan wacana yang terpinggirkan, meskipun tertutupi oleh wacana yang diproduksi oleh kekuasaan di antara mereka. Wacana-wacana ini mereka dapatkan dari berbagai media di luar kelompok mereka (Jamaah Tabligh). Di sisi lain, proses normalisasi untuk memperbolehkan politik praktis yang sejatinya tidak memiliki ruang di dalam Jamaah Tabligh, namun upaya normalisasi itu berlangsung dengan cara pembiasaan melalui media, seperti melalui berita yang beredar di media sosial terkait isu politik yang diglorifikasi. Hal itulah yang kemudian pada akhirnya menyebabkan beberapa anggota Jamaah Tabligh keluar dari jalur dakwah dan mulai bermain dalam politik praktis, khususnya pada Pilpres 2019.

Adapun dalam konteks yang lebih luas, pergeseran identitas politik keagamaan Jamaah Tabligh di Lombok secara kolektif tidak terjadi secara signifikan dan terang-terangan sebagaimana yang terjadi pada beberapa anggota Jamaah Tabligh seperti yang telah dijelaskan di atas. Proses politik yang berkaitan dengan Pilpres 2019 dalam lingkaran Jamaah Tabligh secara kolektif hanya diketahui oleh kalangan mereka sendiri. Subjek-subjek yang berada di luar lingkaran kelompok mereka tidak mengetahui secara persis bagaimana proses politik itu terjadi. Berbeda halnya dengan keterlibatan beberapa anggota dan tokoh Jamaah Tabligh secara individu pada Pilpres 2019, di mana subjek eksternal kelompok mereka dapat melihat dan mengetahui bagaimana sikap politik mereka, siapa calon yang mereka dukung, dan sebagainya. Pada Pilpres 2019, pada dasarnya dalam lingkaran Jamaah Tabligh juga terjadi proses politik, di mana dalam suatu forum yang sangat terbatas di dalamnya disampaikan beberapa hal mengenai perkara dunia yang dianggap penting, salah satunya mengenai pemilihan pemimpin. Dalam forum yang terbatas itu, anggota Jamaah Tabligh dianjurkan untuk memilih pasangan calon presiden tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yakni seiman dan baik agamanya. Dalam hal ini, kepemimpinan Nabi dan para sahabatnya dijadikan sebagai pedoman dalam memilih pemimpin yang sejalan dengan cara-cara yang diamalkan oleh beliau (Nabi dan para sahabatnya). Hal ini sejalan dengan hasil

wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan terkait anjuran dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2019 dan kriteria-kriterianya sebagai berikut:

-"Jelas ada. Cuma (tidak) kayak kita yang langsung sebagai pemainnya lah begitu. Mungkin tetap diarahkan, diarahkan untuk memilih (calon presiden tertentu), pokoknya semua jamaah dihimbau untuk mendukung (calon presiden tertentu), tetapi caranya mereka itu tidak seperti kita yang secara langsung. Ada namanya jaulah 2,5 jam, jadi di jaulah 2,5 jam ini ada pembicaraan perkara dunia di situ, ada pembicaraan perkara akhirat di situ. Nah diutamakanlah perkara agamanya di situ, selesai perkara agama baru diselipkan dengan bahasanya merekalah" (wawancara dengan R tanggal 15 Oktober 2022).

-"Ya tadi itu kan, yang agamanya baik. Kan kita sudah dicontohkan bagaimana pemimpin yang baik seperti Umar bin Khattab ketika ada rakyatnya yang tidak dapat makan, dia sendiri yang bawakan makanan untuknya. Tapi susah kita cari pemimpin seperti itu di zaman sekarang ini. Intinya kita pilih yang terbaik" (wawancara dengan Sd. tanggal 6 Oktober 2022).

Meskipun proses ini terjadi secara tertutup, namun tetap saja keadaan ini menunjukkan bahwa ada kepentingan tertentu yang menyebabkan Jamaah Tabligh ikut terlibat dalam kontestasi politik ini. Kepentingan tersebut adalah keinginan untuk melihat nilai-nilai agama hidup dan berkembang sebagaimana konsep yang mereka anggap ideal tanpa adanya batasan atau upaya kriminalisasi. Sebab, salah satu alasan utama mereka untuk terlibat dalam kontestasi politik dengan cara memilih presiden adalah karena timbulnya perasaan di mana agama Islam diperlakukan dengan tidak adil, ulama dikriminalisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang ideal menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang menyatakan:

"Mungkin karena seperti yang saya katakan tadi itu, karena pandangan-pandangan terhadap ketidakadilan terutama di kalangan-kalangan orang Islam, kalangan ulama kan, karena kalau kalangan ulama kan sangat merasakan" (wawancara dengan R tanggal 15 Oktober 2022)

Proses keterlibatan Jamaah Tabligh pada Pilpres 2019 yang tidak terjadi secara langsung dan terang-terangan ini sejalan dengan pemikiran Foucault bahwa konsep kekuasaan tidak didasarkan atas tindakan represif yang memaksa. Sebaliknya, kekuasaan cenderung menggunakan cara-cara yang hegemonik untuk menormalisasikan sesuatu yang dikehendakinya (Kamahi, 2017). Dalam kasus Jamaah Tabligh, proses yang dilakukan oleh kekuasaan di dalam Jamaah Tabligh itu sendiri tidak memaksa para anggotanya untuk memilih calon presiden tertentu yang menurut mereka benar, melainkan melalui cara-cara yang tidak dirasakan sebagai sebuah proses penundukan terhadap subjek secara

represif. Sehingga, proses untuk “menundukkan” anggota Jamaah Tabligh yang lain agar bersedia memilih pemimpin sebagaimana yang dikehendaki oleh kekuasaan di antara mereka dinormalisasikan melalui forum-forum yang terbatas sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, mayoritas anggota Jamaah Tabligh merasa tidak pernah ada paksaan atau upaya lain yang dilakukan oleh kekuasaan di kalangan mereka untuk menggiring mereka memilih pemimpin tertentu pada Pilpres 2019 secara represif.

Dampak Keterlibatan dan Pergeseran Identitas Politik Keagamaan

Dampak keterlibatan Jamaah Tabligh baik secara individu dan kolektif dalam Pilpres 2019 yang dilakukan secara terang-terangan maupun tidak, yang kemudian berakibat terhadap terjadinya pergeseran identitas politik keagamaan mereka setidaknya dapat ditinjau dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif internal kelompok Jamaah Tabligh. Berbagai bentuk keterlibatan Jamaah Tabligh dalam Pilpres 2019 telah berdampak terhadap mulai lunturnya konsistensi mereka dalam mengamalkan *usul dakwah* yang ada pada ajaran kelompok mereka. Pengamalan ajaran ini menjadi penting, sebab identitas mereka sangat bergantung pada ajaran/ideologi yang mereka amalkan. Di sisi lain, keterlibatan mereka dalam politik juga menimbulkan pertentangan dari anggota Jamaah Tabligh lain yang masih berpegang teguh pada *usul dakwah* tersebut.

Kedua, dari perspektif eksternal Jamaah Tabligh. Keterlibatan beberapa tokoh Jamaah Tabligh yang terekspos ke ranah publik mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap mereka akan sarat dengan sentimen. Sebab, sejauh ini Jamaah Tabligh dikenal sebagai kelompok yang tidak ingin terlibat dalam urusan politik praktis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, untuk menguatkan *branding* tersebut, Jamaah Tabligh juga mengkomparasikan pendirian kelompok mereka yang menafikan urusan politik dengan kelompok lain yang melakukan tindakan yang berbeda dalam menyikapi isu politik. Menurut Tajfel dan Turner, hal ini terjadi karena adanya kecenderungan suatu kelompok untuk menjadikan kelompok lain sebagai perbandingan untuk menguatkan identitas kelompok mereka (Hogg & Abrams, 1990). Namun, dengan terlibatnya Jamaah Tabligh dalam kontestasi politik, artinya sesuatu yang menjadikan mereka memiliki identitas yang kuat dan cenderung berbeda dengan kelompok Islam lainnya akan dianggap hilang oleh publik. Sehingga, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan kalau publik akan memandang bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Jamaah Tabligh dengan kelompok Islam lain dalam menyikapi masalah politik.

Hasil penelitian ini sekaligus menutup *gap* dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Jamaah Tabligh dalam konteks politik. Dalam beberapa hasil penelitian, ditemukan bahwa sebelum momentum Pilpres 2019, Jamaah Tabligh benar-benar menutup diri dari kontestasi politik. Mereka melakukan gerakan dakwah murni tanpa menyentuh aspek politik, apalagi

sampai terlibat di dalamnya. Penelitian Saipul Hamdi (2017) menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh merupakan kelompok Islam yang murni melakukan gerakan-gerakan di bidang agama dan dakwah, tanpa menyentuh isu politik sedikitpun. Menurutnya (2017), Jamaah Tabligh tidak begitu paham dan peduli tentang isu politik baik di tingkat nasional maupun internasional.

Temuan dalam penelitian ini yang cenderung berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan identitas politik Jamaah Tabligh antara sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Perbedaan tersebut menurut pandangan peneliti merupakan sesuatu yang sangat prinsipiell, sebab keterlibatan Jamaah Tabligh dalam kontestasi politik merupakan sesuatu yang dipandang tabu sebelumnya. Oleh sebab itu, temuan ini menjadi kontribusi penting dalam kajian tentang Jamaah Tabligh dalam konteks politik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, penulis menarik beberapa poin kesimpulan. *Pertama*, dalam menyikapi sistem yang dianut dan berkembang di Indonesia seperti Pancasila dan demokrasi, Jamaah Tabligh cenderung bersikap pragmatis, di mana mereka tidak mempermasalahkan terkait sistem negara seperti apa yang diterapkan. Sebab, dalam konsep mereka, *khilafah Islamiyah* tidak didirikan dengan cara merubah sistem negara yang sudah ada sekarang melalui tindakan-tindakan seperti demonstrasi dan sebagainya. Bagi mereka, yang paling penting dalam konsep *khilafah Islamiyah* ini adalah tentang bagaimana agar nilai-nilai agama Islam itu terinternalisasi dengan baik dan sempurna oleh setiap individu sehingga sistem itu akan menjadi baik dan sejalan dengan syariat Islam dengan sendirinya ketika nilai-nilai Islam itu sudah diamalkan oleh setiap individu muslim.

Kedua, dalam kontestasi Pilpres 2019 di Lombok, Jamaah Tabligh ikut terlibat baik sebagai partisipan maupun tim sukses atau juru kampanye calon presiden tertentu. Keterlibatan mereka dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dilarang di dalam Jamaah Tabligh selagi sudah keluar dari kegiatan *khuruj*, *bayan*, *jaulah*, dan sebagainya, serta tidak menjadikan Jamaah Tabligh sebagai alat politik. Adapun perspektif lain memandang keterlibatan tersebut sebagai bentuk pergeseran identitas politik keagamaan karena telah keluar dari *usul dakwah* yang diamalkan di dalam Jamaah Tabligh. Selanjutnya, keterlibatan Jamaah Tabligh secara kolektif dalam Pilpres 2019 tidak dilakukan secara signifikan dan terang-terangan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa anggota atau tokoh mereka. Proses keterlibatan mereka dilakukan secara hegemonik, di mana mereka dianjurkan untuk memilih calon presiden tertentu sesuai dengan kriteria yang baik dalam Islam. Namun, pilihan itu diserahkan kembali secara sepenuhnya kepada setiap anggota Jamaah Tabligh sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing.

Ketiga, keterlibatan Jamaah Tabligh pada Pilpres 2019 di Lombok dan pergeseran identitas politik keagamaan mereka pada akhirnya berdampak terhadap dua hal, yakni mulai lunturnya konsistensi mereka dalam mengamalkan *usul dakwah* untuk tidak berpolitik, serta *branding* identitas mereka sebagai kelompok Islam yang tidak menyentuh urusan politik mulai dianggap hilang oleh publik, sehingga publik menilai pendirian mereka dalam konteks ini tidak jauh berbeda dengan kelompok Islam lainnya.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya menutupi *gap* tulisan-tulisan sebelumnya yang tidak menyentuh perubahan identitas politik keagamaan Jamaah Tabligh, tetapi juga memperkaya data tentang *multilayers* dan varian *landscap* politik Jamaah Tabligh yang berubah-ubah sesuai dengan *setting* sosial dan politik yang berkembang di masyarakat termasuk dalam kasus Pilpres 2019 di Indonesia.

Jamaah Tabligh berpotensi terlibat dalam Pilpres 2024 dan Pilpres berikutnya meskipun mereka melarang keterlibatan dalam politik, karena mereka menghormati sistem demokrasi di Indonesia dan hanya terlibat dalam kegiatan dakwah dalam forum khuruj. Untuk keterlibatan Jamaah Tabligh dalam Pilpres 2024 sebagai pendukung calon tertentu masih tidak dapat diprediksi karena faktor-faktor politik yang belum jelas dan pembelajaran dari pengalaman Pilpres sebelumnya. Ramalan awal penelitian ini memperlihatkan kecenderungan mereka untuk terlibat pada Pilpres 2024 sebagai juru kampanye dan tim sukses.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada redaksi jurnal *Harmoni* yang telah memberikan kesempatan publikasi untuk artikel ini, dan kepada seluruh reviewer atas kritikan dan masukan guna perbaikan naskah artikel hingga layak untuk dipublikasikan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didukung oleh anggaran dana hibah dari BRIN.

DAFTAR ACUAN

- Ardipandanto, A. (2020). Dampak politik identitas pada pilpres 2019: Perspektif populisme, *Jurnal Politica*. 11(1):43-63.
- Astuti, R.D.P. (2017). Perubahan pondok pesantren modern di perkotaan: Studi kasus pondok pesantren Al-Adzkar Tangerang Selatan, Banten. *Masyarakat*, 22(2):257-279.
- Azmi, Muhyiddin. (2022). Ajaran moral tuan guru dan pengaruhnya terhadap laku keberagamaan masyarakat Muslim Sasak dalam perspektif Islam dan sosiologi modern. *Harmoni*. 21(2): 265-277
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Budiman, D. dan Saifullah A.R. (2019). Analisis Wacana Kritis Foucault terhadap *Human Trafficking* dalam Kasus Pengantin Pesanan (*Mail Ordered Bride*) Lintas Negara Pada Pemberitaan Di Media Sosial. In *Seminar Internasional Riksa Bahasa*.
- Candra, Zamzami, dan Indra, D. S. (2019). Pandangan Jamaah Tabligh terhadap politik: Studi di kecamatan Nanggalo kota Padang. *JISPO*. 9(2):189-202.
- Foucault, M. (1972). *The archeology of knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Hamdi, S. (2011). Reproduksi konflik dan kekuasaan dalam organisasi Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hamdi, S. (2022). Covid-19, Social stigma and changing religious practice in Tablighi Jamaat communities in Lombok, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 76,
- Hamdi, S. (2017). Integrasi umat, kemiskinan, dan radikalisme dalam jamaah Tablighi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*. 7(1):26-54.
- Hasanah, U. (2017). Jama'ah Tabligh I (sejarah dan perkembangan). *El-Afkar*. 6 (1):1-10.
- Hidayat, A. A., Januri, F., Syahid, A. A., dan Samsudin. (2018). Deradicalization of religion models: Comparative study of Jamaah Tablig movement in the region of Garut, Indonesia and Yala, Thailand. *Historia Madania*. 2(2):179-196.
- Hidayat, M.A. (2019). Menimbang teori-teori sosial postmodern: Sejarah, pemikiran, kritik dan masa depan postmodernisme. *Journal of Urban Sociology*. 2 (1):42-64.

- Hogg, M.A., dan Abrams, D. (1990). *An introduction to the social identity approach*. Dalam Abrams, D., Hogg, M.A. (Eds), *Social identity theory: Constructive and critical advances*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Huda, M., dan Dayat, M. (2019). Politisasi ulama pada pilpres 2019 perspektif Kyai Silo di Kabupaten Pasuruan. *Kabilah*, 4(1):48-56.
- Jenkins, R. (2008). *Social identity*. Edisi ke-3. Routledge: New York, USA.
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Al-Khitabah*. 3 (1):117-133.
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 3(1):63-75.
- Mills, S. (1997). *Discourse*. London dan New York: Routledge.
- Mubarak, H., dan Razak, A. (2015). Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap khilafah, demokrasi, dan monarki (satu tinjauan di Jambi). *Al-Risalah*. 15(02):241-256.
- Nasrudin, J. (2018). Politik identitas dan representasi politik (Studi Kasus pada pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya*. 1(1):34-47.
- Pitsoe, V., & Letseka, M. (2013). Foucault's discourse and power: Implications for instructionist classroom management. *Open Journal of philosophy*, 3(01), 23.
- Pratama, D. B. (2021). Populisme Islam dalam gerakan 212. *Saskara*. 1(1):1-26.
- Pratama, R.A. (2021). Kekuasaan, pengetahuan, dan hegemoni bahasa dalam perspektif Michel Foucault dan Francis Bacon. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 4 (1):33-43.
- Putra, T., Helmi, dan Muhammad, H. A. (2020). Gerakan Jamaah Tabligh (Jt) dan implikasinya terhadap budaya politik masyarakat Kota Jambi. (*Doctoral dissertation*, Universitas Jambi).
- Rijal, A. (2019). Politik tuan guru versus politik media "pilpres 2019 di Lombok antara dakwah dan politik. *Tasâmuh*. 16(2):21-44.
- Rubaidi, dan Setianingsih, D. (2021). Politik identitas Islam Indonesia kontemporer: Radikalisme Islam versus moderatisme Islam dalam politik elektoral pilpres 2019. *Potret Pemikiran*. 25(2):149-167.
- Saipul Hamdi (Produser). (2020). Kemana Jamaah Tabligh pada Pilpres 2019: Masa depan mereka pasca Covid-19. Mataram, Indonesia: Saipul Hamdi "Pulham" Media. 11 menit.

Setyaningrum, A. (2005). Memetakan lokasi bagi “politik identitas” dalam wacana politik poskolonial. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. 2 (2)

Siswanto, E., dan Islamy, A. (2022). Meninjau ulang polemik formalisasi hukum Islam di Indonesia perspektif demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *Miyah*. 18(1):19-40.